

# Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2024



bank madiun

Jl. Raya Solo No. 30, Jiwan Madiun, Jiwan, Madiun  
Telp.: 0351463278 , Fax.: 0351483248

PERUMDA BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis (LPPRB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

## 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

### 1. Pencapaian RAKB

No	Uraian/Tahun	N-1	
1.	Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan		
	a. Penghimpunan Dana	-	-
	b. Penyaluran Dana	-	-
2.	Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan		
	a. Total Kredit Kegiatan Usaha Berkelanjutan		-
	b. Total Non Kredit Non Kegiatan Usaha Berkelanjutan		-
	Persentasi Total Kredit Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total KYD (%)		-
3.	Jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	-	-
	a. Energi Terbarukan	-	-
	b. Efisiensi Energi	-	-
	c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-
	d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-
	e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-
	f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-
	g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-
	h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-
	i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-
	j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional atau Regional	-	-
	k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-
	l. Kegiatan UMKM	-	-

## 2. Visi dan Misi

### 1. Visi Utama BPR

Menjadikan lembaga usaha daerah yang sehat, menguntungkan, dan bermanfaat bagi pemilik (Pemerintah Daerah), pengelola, dan masyarakat.

#### Visi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Menjadikan lembaga usaha daerah yang sehat, menguntungkan, dan bermanfaat bagi pemilik (Pemerintah Daerah), pengelola, dan masyarakat dengan memperhatikan keselarasan aspek keuangan berkelanjutan.

### 2. Misi Utama BPR

1. Memberikan pelayanan prima dalam pembiayaan kredit usaha kecil dan menengah, kredit pegawai, serta menyediakan produk usaha perbankan lainnya.
2. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.
3. Menyelenggarakan manajemen perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
4. Memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
5. Memenuhi komitmen kepada pemilik (Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

1. Memberikan pelayanan prima dalam pembiayaan kredit usaha kecil dan menengah, kredit pegawai, serta menyediakan produk usaha perbankan lainnya.
2. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.
3. Menyelenggarakan manajemen perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
4. Memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
5. Mengoptimalkan produk dan layanan jasa keuangan berkelanjutan.
6. Memenuhi komitmen kepada pemilik (Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3. Tujuan RAKB

Tahun 2024, menjadi Bank yang unggul dan terdepan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah Kabupaten Madiun.

### Strategi Keberlanjutan untuk Mencapai Tujuan RAKB

1. Peningkatan porsi penyediaan pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan sesuai Surat Keputusan Direksi tentang Kredit kepada UMKM.
2. Penyesuaian organisasi dengan menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan Usaha Keuangan Berkelanjutan yaitu Kadiv Operasional yang diangkat sesuai Surat Keputusan Direksi.

### 4. Program yang Akan Dilaksanakan dalam RAKB

Bank menetapkan rencana aksi dalam jangka panjang (lima tahun) dan jangka pendek (satu tahun).

### RAKB BPR 5 (LIMA) TAHUNAN

Rencana lima tahun memuat paling sedikit:

1. Target kegiatan prioritas selama lima tahun
2. Indikator keberhasilan dari setiap kegiatan prioritas per tahun
  1. Indikator terkait dengan pengembangan produk dan/atau jasa;
  2. Indikator terkait pengembangan kapasitas intern bank;
  3. Indikator penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional.

No	Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan BPR
1.	2024	Seluruh pengurus dan pegawai mengikuti program peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan	Sebanyak 100% dari total pengurus dan pegawai mengikuti Training terkait Keuangan Berkelanjutan.
2.	2025	Sebagian besar perangkat perkreditan untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup tinggi telah mengikuti program peningkatan kapasitas manajemen risiko terkait	Sebanyak 50% dari perangkat perkreditan telah mengikuti training terkait AMDAL/ manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup
3.	2026	Menerbitkan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan	Produk dan /atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang baru, telah disalurkan kredit kepada beberapa UMKM produk dengan produk atau jasa yang mendukung produk ramah lingkungan.
4.	2027	Risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis bank	Telah disusun SOP mengenai integrasi risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola ke dalam aktivitas bisnis pada kredit produk/jasa Keuangan Berkelanjutan

5.	2028	Sejak tahun pertama implementasi, portofolio berkelanjutan mengalami peningkatan sebesar 100%	Jumlah kredit berkelanjutan pada 31 Desember 2028 sebesar Rp. 223 miliar atau meningkat 113% dari jumlah kredit berkelanjutan pada 31 Desember 2023
----	------	---	---

## RAKB BPR 1 (SATU) TAHUN

### Target Kegiatan Prioritas

Seluruh pengurus dan pegawai direncanakan akan mengikuti program peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan pada Triwulan II Tahun 2024.

### Indikator Keberhasilan

Seluruh pengurus dan pegawai akan diikutkan pada Training terkait Keuangan Berkelanjutan

No	Bulan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
1.	Juni	Pengikutsertaan seluruh pengurus dan pegawai dalam training Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan penyadartahuan	Diikuti seluruh pengurus dan pegawai

## 5. Indikator Pengawasan dan Evaluasi dari PKB

Realisasi RAKB diawasi dan dievaluasi oleh berbagai unit kerja, termasuk unit kerja yang menangani manajemen risiko kredit. Unit kerja ini melakukan pengawasan dan evaluasi pada kualitas kredit, dan peringkat risiko debitur. Secara berkala, Unit Kerja yang khusus menangani Kegiatan Keuangan Berkelanjutan menerima laporan dan mengadakan pertemuan dengan unit-unit terkait Keuangan Berkelanjutan sebagai bagian dari pengawasan. Unit Kerja yang khusus menangani Keuangan Berkelanjutan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan unit kerja lainnya yang terlibat dalam penyediaan data dan informasi Keuangan Berkelanjutan, dan melaporkan kinerja Keuangan Berkelanjutan dalam Laporan Keberlanjutan. Selain itu, bank juga melakukan audit berkala minimal 3 tahun sekali, untuk memastikan kebijakan, prosedur dan kinerja keberlanjutan berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

Secara periodik, PE Manajemen Risiko/Satuan Kerja Manajemen Risiko memantau portofolio kredit, termasuk memastikan diversifikasi yang sesuai dengan *risk appetite Bank*. Hasil pemantauan akan disampaikan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan /Manajemen Risiko. Dalam merespons risiko keberlanjutan, Bank melakukan stress test secara rutin untuk memastikan bahwa perusahaan memahami dinamika bisnis.

## 6. Alokasi Sumber Daya

### a. Anggaran

Bank akan mengikutsertakan seluruh pengurus dan pegawai dalam training kegiatan keuangan berkelanjutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diambilkan dari Dana Pendidikan.

### b. Sumber Daya dan Mitra Kerjasama

Bank akan selalu mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti training terkait AMDAL/ manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup sehingga pegawai/pejabat dapat memahami dengan baik konsep dasar Kegiatan Keuangan Berkelanjutan.

### c. Penanggung Jawab Pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal mendukung terwujudnya RAKB dan dapat melakukan secara mandiri implementasi LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) untuk mewujudkan kegiatan keuangan berkelanjutan, maka ditunjuk penanggung jawab pelaksanaannya dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi yaitu Pejabat Eksekutif Operasional sesuai SK Direksi.

Satuan Kerja	Tugas dan Tanggung Jawab
Direksi	Pengarah/Pengambil Keputusan
Unit Kerja Manajemen Risiko	Melakukan penyesuaian analisis manajemen risiko Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan Regulator
Unit Kerja Pemasaran	Merencanakan peningkatan portfolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan
Unit Kerja Operasional	Menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

## 2. PROSES PENYUSUNAN RAKB

Penyusunan laporan RAKB secara internal dilakukan oleh Unit Kerja Khusus yang menangani Kegiatan Keuangan Berkelanjutan dan diverifikasi oleh Satuan Kerja Audit Internal. Pemeriksaan pihak internal melibatkan tim yang khusus menangani Kegiatan Keuangan Berkelanjutan, seluruh kontributor data dan pejabat dari fungsi terkait, hingga mendapat persetujuan dari Direksi dan Dewan Pengawas. Dalam menyusun RAKB, Bank merujuk pada prinsip laporan yang mencakup akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, keandalan, dan ketepatan waktu.

Penyusunan dan implementasi RAKB senantiasa diawasi langsung oleh Direksi dengan dibantu oleh gabungan dari berbagai unit kerja yaitu Unit Kerja Operasional, Unit Kerja Manajemen Risiko, dan Unit Kerja pemasaran.

## 3. FAKTOR PENENTU RAKB

### 1. Rencana Strategis Bisnis yang Telah Ada

1. Rencana strategis bisnis 2023 belum mencantumkan kegiatan Keuangan Berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek LST.
2. Rencana strategis bisnis 2024 telah mencantumkan kegiatan Keuangan Berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek LST.
3. Rencana strategis ke depan, Bank terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan berbasis digital dengan berbagai fitur kemudahan dan kenyamanan bertransaksi. Digitalisasi merupakan salah satu inisiatif untuk mengurangi penggunaan kertas.
4. Penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro yang layak (*feasible*) namun belum memiliki akses terhadap pendanaan dari LJK yang diarahkan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan.

### 2. Kapasitas Organisasi yang Dimiliki Sekarang

1. Bank akan melakukan penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, di tahun 2024 yang akan diatur dengan Surat Keputusan Direksi.
2. Sebagian besar perangkat perkreditan untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup tinggi akan mengikuti program peningkatan kapasitas manajemen risiko terkait kegiatan penyaluran kredit berbasis lingkungan dan sosial sesuai RBB 2024.

### 3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis yang Dimiliki Sekarang

1. Pengelolaan risiko LST tidak lepas dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* (GCG) karena sangat berpengaruh pada kesehatan bank.
2. Bank selalu meninjau kredit-kredit pada sektor yang memiliki risiko LST yang tinggi melalui Kebijakan Perkreditan yang Bertanggung Jawab dan Kebijakan Lingkungan sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah dan Otoritas terkait.
3. Pada aspek lingkungan, Bank meneruskan upaya mengurangi emisi karbon melalui upaya penerapan produk dan solusi perbankan digital, tempat kerja berbasis digital, gedung ramah lingkungan serta pelestarian alam.

### 4. Kerjasama dengan Pihak Eksternal Jika Ada

Dalam hal mendukung terwujudnya RAKB, Bank melakukan secara mandiri program-program LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang kompeten pada bidang keuangan berkelanjutan dan telah mendapat pelatihan terkait AMDAL/ manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup.

### 5. Strategi Komunikasi yang Ada

1. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bank, salah satunya dari sisi literasi keuangan, penggunaan teknologi terus ditingkatkan, termasuk jangkauan akses perbankan. Kesadaran atas keamanan data dan penggunaan teknologi menjadi tantangan tersendiri, untuk itu diperlukan aksi edukasi dan sosialisasi secara terus menerus bersama dengan semua pemangku kepentingan.
2. Bentuk komunikasi yang efektif yang lain yaitu komitmen bank dalam berbagi nilai sosial dan diperkuat dengan ditetapkannya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, yang menjadi payung besar pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

### 6. Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Mitigasi yang Selama Ini Dijalankan

1. Pemetaan portofolio kredit Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), bersamaan dengan pembenahan implementasi green banking secara internal.
2. Bank menerapkan asesmen LST untuk setiap pemberian kredit dan pengembangan produk berwawasan LST sebagai bagian dari strategi bisnis bank.

### 7. Kebijakan Pemerintah yang Terkait dengan Isu Keuangan Berkelanjutan

1. Adanya perhatian yang semakin tinggi dari Pemerintah dan investor terkait penerapan bisnis berkelanjutan yang diharapkan dapat menciptakan produk-produk berwawasan lingkungan.
2. Semakin banyaknya dunia usaha yang mulai memperhatikan aspek lingkungan dalam melakukan bisnisnya.
3. Bank memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik (*difabel*) dan menghormati hak-hak mereka. Kesempatan tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan kaum disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Usaha Meningkatkan Kesejahteraan bagi Kaum Disabilitas.

#### 4. PRIORITAS DAN URAIAN RAKB

##### 1. Program Prioritas

Peningkatan Portofolio Hijau sebagai bagian dari program aksi untuk penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berupa peningkatan kredit UMKM di Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk RBB 2024 sebesar 8,89%

##### 2. Dasar Pemikiran

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh rakyat, serta melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara bijaksana di Indonesia, proses pembangunan ekonomi harus mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup sebagai implementasi pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan BPR masih belum dilakukan pemetaan portofolio kredit Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), serta sebagian besar perangkat perkreditan untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup tinggi belum mengikuti program peningkatan kapasitas manajemen risiko terkait kegiatan penyaluran kredit berbasis lingkungan dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan utama dari program prioritas BPR adalah:

1. Meningkatkan kapasitas internal dalam Kegiatan Keuangan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Akses dan keterjangkauan produk dan layanan keuangan berkelanjutan bagi nasabah.
3. Meningkatkan dampak potensial dan aktual dari Kegiatan Keuangan Berkelanjutan pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis di masa depan.
4. Mendukung terciptanya penerapan Perbankan Berkelanjutan, Pengembangan Budaya Berkelanjutan dan Penciptaan Nilai Berkelanjutan.

##### 3. Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya Yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
1.	Penyusunan SOP Kegiatan Keuangan Berkelanjutan	01-01-2024	31-12-2024	Alokasi SDM: Unit Kerja Bisnis & Kepatuhan /Manajemen Risiko Alokasi Anggaran: Rp. 25.000.000	Unit Kerja Operasional
2.	Penyusunan Program Prioritas Kegiatan Keuangan Berkelanjutan tahun 2024	02-01-2024	31-12-2024	Alokasi SDM: Unit Kerja Operasional Alokasi Anggaran: Rp. 350.000.000	Unit Kerja Operasional

##### 4. Sumber Daya

###### 1. Sumber Dana

Sumber dana untuk penyaluran kredit berkelanjutan TJSL berasal dari Dana Pihak Ketiga, dan Simpanan Bank Lain yang dianggarkan sekitar 100% dari seluruh Rencana Penyaluran Kredit di Tahun 2024.

Sedangkan sumber dana untuk peningkatan kapasitas intern terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berasal dari Dana Pendidikan yang dianggarkan sebesar 0,5% dari total rencana anggaran pendidikan pada tahun 2024 sebesar 5%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pengelolaan aspek keberlanjutan menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh unit kerja, di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk memastikan implementasi tata kelola keberlanjutan, dan pengawasan implementasi Keuangan Berkelanjutan, BPR memiliki unit kerja khusus yang menangani Kegiatan Keuangan Berkelanjutan. Unit kerja ini menjadi bagian dari Divisi SDM Perusahaan. Divisi ini bertanggung jawab kepada Pejabat Eksekutif, yang kemudian disampaikan kepada Direktur Operasional untuk melaporkan kinerja Keuangan Berkelanjutan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas.

## 3. Mitra Kerjasama

Dalam hal mendukung terwujudnya RAKB, Bank tidak melakukan kerjasama dengan pihak ekstern (Konsultan) dan melakukan secara mandiri program-program LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang kompeten pada bidang keuangan berkelanjutan dan telah mendapat pelatihan terkait AMDAL/ manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup.

## 5. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

## 6. Tantangan dan Rencana ke Depan



## 5. TINDAK LANJUT RAKB

Bank akan melakukan kaji ulang/ulang RAKB secara rutin untuk target/sasaran yang belum terealisasi /terimplementasi untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan dan kompleksitas usaha Bank.

Kaji Ulang/Evaluasi terhadap RAKB BPR meliputi:

1. Kompetensi Pegawai/Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan.
2. Target dan Realisasi Keuangan Berkelanjutan.
3. Tindak lanjut jika Realisasi Keuangan Berkelanjutan tidak mencapai target.
4. Mitigasi risiko tidak terealisasinya RAKB BPR.

Madiun, 20 September 2024  
Direksi

Dewan Komisaris

**VELLY MURDIANTO, S.E.**  
Direktur Utama

**PUJI RAHMAWATI, S.Sos, M.Si**  
Ketua Dewan Pengawas

**ARIP WIDODO, S.E.**  
Direktur Pemasaran/Bisnis

**NINING LESTARI, S.E.**  
Anggota Dewan Pengawas